

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan disegala bidang telah cukup lama dilaksanakan di Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi yang telah menciptakan peningkatan pendapatan perkapita Negara dan perbaikan kualitas hidup manusia secara rata-rata. Namun, hasil pembangunan yang dicapai justru menimbulkan akibat negatif dalam bentuk kesenjangan antar golongan pendapatan, antar wilayah, dan antar kelompok masyarakat. Permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk ditangani, khususnya di wilayah perkotaan. Salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin, adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dibawah standar kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu¹

Krisis ekonomi yang melanda negara Indonesia membawa dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat. Kesulitan ekonomi tersebut berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup secara wajar baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini apabila dibiarkan akan membawa dampak terhadap ketahanan masyarakat dan ketertiban sosial masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memberdayakan sistem-sistem sosial yang ada di masyarakat

¹ Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan 2008*, Jakarta, 2008, hlm 110.

dalam rangka memenuhi kebutuhan warga masyarakat secara memadai. Pemerintah menyadari bahwa untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial dengan paradigma baru ini tidak mudah sehingga ini tidak bisa dilaksanakan sendiri tanpa partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dan swasta diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk membantu pemerintah dalam penyelesaian masalah ini, sehingga mulai berdirilah berbagai Lembaga Pelayanan Sosial (LPS) untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan pelayanan sosial bagi masyarakat. Bahkan dalam kenyataan peran lembaga pelayanan sosial mendapat respon positif dari masyarakat dan lebih menyentuh permasalahan warga. Sebagaimana dilukiskan oleh Harry Hikmat (2004: 130), sebagai berikut:

... ditinjau dari sisi pemerintah, penanganan masalah kemiskinan dan penanggulangan dampak sosial krisis ekonomi merupakan hasil dari perencanaan dari atas sehingga masyarakat akhirnya hanya sebagai pelaksana. Walaupun dalam perencanaan pembangunan dikatakan bahwa masyarakat bertindak sebagai subyek pembangunan, pada kenyataannya keterlibatan mereka secara langsung dalam proses perencanaan dari bawah sulit dilaksanakan. Keadaan ini berbeda dengan pembangun masyarakat yang biasa dilakukan oleh LSM. Secara umum, ini terjadi karena LSM dapat melepaskan diri dari keterikatan kepada struktur organisasi pemerintah, baik secara vertikal maupun horizontal (maksudnya wilayah administrasi) sehingga LSM dapat mengembangkan masyarakat yang mereka kelola secara lebih leluasa dan disesuaikan dengan kebutuhan aktual masyarakat yang bersangkutan.

Organisasi merupakan bagian yang mendasar dalam kehidupan manusia sehari-hari. Setiap kita adalah anggota, belajar, dan melakukan kegiatan-kegiatan dalam organisasi, dan dari organisasi pula setiap kita memperoleh pelayanan-pelayanan penting yang selaras dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Kebanyakan dari kita juga bekerja di organisasi-organisasi dan

menghabiskan sebagian besar dari waktu, energi, komitmen, tujuan dan harapan pada organisasi di mana kita berada. Disisi lain, sering kita temui bahwa kebanyakan organisasi juga tidak berfungsi secara baik dalam memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat sekitarnya yang juga mengakibatkan kebosanan dan ketidakbetahan bagi pengurusnya. Tetapi sebaliknya, jika organisasi dinilai memberi kontribusi yang baik dan menguntungkan anggotanya maka organisasi tersebut semakin berkembang karena memotivasi semangat dari para pengurusnya untuk bekerja dengan segala modifikasi/kegiatan yang akan menambah eksisnya organisasi tersebut. Oleh karena itu, dalam suatu organisasi diperlukan kinerja yang baik.

Organisasi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di Desa Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, untuk mengatasi masalah kemiskinan pemerintah telah mengeluarkan salah satu program yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri dengan membentuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dengan standar pengelolaan yang sudah ditetapkan, ditambah dengan kebijakan *intern* kepengurusan BKM itu sendiri. Berdasarkan wilayah administratif BKM Sayati mencakup satu Desa Sayati yang luas wilayahnya 301 020 Ha, dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Desa Margahayu Utara, sebelah selatan dengan Desa Sulaeman, sebelah timur Desa Sukamenak dan sebelah barat Desa Margahayu Selatan. Jumlah penduduk Desa Sayati sebanyak 29044 Orang dengan mayoritas beragama Islam, yang terbagi atas 14 RW dan 70 RT. Dengan rata-rata mata pencaharian sebagai buruh dan pegawai swasta.

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Sayati pada tahun 2000 mendapat Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) melalui Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Bantuan tersebut dialokasikan untuk perbaikan lingkungan dan peningkatan perekonomian masyarakat dalam bentuk pemberian pinjaman bergulir. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam pengelolaan dana bergulir mempunyai sebuah unit pengelola yaitu Unit Pengelola Keuangan (UPK). UPK-BKM Sayati telah mengulirkan dana alokasi bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Desa Sayati. Dana perguliran masih mengalami kemacetan di masyarakat (KSM) sebagai pihak yang meminjam dana. Kemacetan tersebut terjadi disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang muncul seiring perjalanan kelembagaan BKM tersebut, sehingga program yang tujuannya untuk pengentasan kemiskinan akhirnya menjadi katalisator dalam penciptaan kemiskinan.

Mempertimbangkan perkembangan positif P2KP tersebut, mulai tahun 2007 telah dirintis untuk mengadopsi P2KP menjadi bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, oleh sebab itu mulai tahun tersebut PNPM Mandiri diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)² dan pencapaian sasaran Millenium

² IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan suatu negara, yang direpresentasikan oleh 3 dimensi, yaitu: umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kualitas hidup yang layak.

Development Goals (MDGs)³ sehingga tercapai pengurangan penduduk miskin sebesar 50% di tahun 2015⁴.

Tingkat Kelurahan dalam menjalankan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri tersebut, dibentuklah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), yang berfungsi membangun kembali kehidupan masyarakat mandiri, yang mampu mengatasi kemiskinan. Lembaga kepemimpinan masyarakat yang mengakar, representatif dan dipercaya tersebut dibentuk melalui kesadaran kritis masyarakat untuk menggali kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan sebagai pondasi modal sosial kehidupan masyarakat. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) ini merupakan lembaga yang ditugaskan secara khusus untuk menangani permasalahan kemiskinan masyarakat melalui pendekatan langsung dengan masyarakat.

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) selain diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dari kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan, mulai dari proses penentuan kebutuhan, proses penyusunan program, pelaksanaan program hingga pemanfaatan dan pemeliharaan.

³ MDGs adalah kesepakatan global untuk mencapai target pembangunan bersama yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan, pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan, mengurangi angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi penyakit menular dan penyakit lainnya, menjamin kelestarian lingkungan hidup, dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

⁴ Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, *Petunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri – P2KP 2007*, Jakarta, 2007, hlm. 1.

Pada pelaksanaannya, tidaklah mudah bagi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) melaksanakan fungsinya tersebut. Terutama dalam hal perguliran dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang digulirkan langsung kepada masyarakat miskin. Perguliran dana tersebut didasarkan pada suatu perjanjian antara Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan masyarakat yang membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Orientasi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang hanya menitikberatkan pada salah satu dimensi dari gejala-gejala kemiskinan tersebut, pada dasarnya mencerminkan pendekatan program yang bersifat parsial, sektoral, *charity* dan tidak menyentuh akar penyebab kemiskinan itu sendiri. Akibatnya program-program dimaksud tidak mampu menumbuhkan kemandirian masyarakat yang pada akhirnya tidak akan mampu mewujudkan aspek keberlanjutan (*sustainability*) dari program-program penanggulangan kemiskinan tersebut.

Berbagai program penanggulangan kemiskinan terdahulu dalam kenyataannya sering menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan, misalnya salah sasaran, terciptanya benih-benih fragmentasi sosial, dan melemahkan nilai-nilai kapital sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, musyawarah, keswadayaan dan lain-lain). Lemahnya nilai-nilai kapital sosial pada gilirannya juga mendorong pergeseran perubahan perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama.

Kondisi kapital sosial serta perilaku masyarakat yang melemah serta memudar tersebut salah satunya disebabkan oleh keputusan, kebijakan dan tindakan dari pengelola program kemiskinan dan pemimpin-pemimpin masyarakat yang selama ini cenderung tidak adil, tidak transparan dan tidak tanggung gugat (*tidak pro poor dan good governance oriented*) Sehingga menimbulkan kecurigaan, stereotype dan skeptisme di masyarakat

Keputusan, kebijakan dan tindakan yang tidak adil ini biasanya terjadi pada situasi tatanan masyarakat yang belum madani, dengan salah satu indikasinya dapat dilihat dari kondisi kelembagaan masyarakat yang belum berdaya, yang tidak berorientasi pada keadilan, tidak dikelola dengan jujur dan tidak ikhlas berjuang bagi kepentingan masyarakat⁵

Karakteristik kemiskinan dan krisis ekonomi yang terjadi telah menyadarkan berbagai pihak bahwa pendekatan dan cara yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki, yaitu kearah perubahan perilaku/sikap dan cara pandang masyarakat yang senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai universal kemanusiaan (moral), prinsip-prinsip kemasyarakatan (*good governance*) dan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)

Perubahan perilaku/sikap dan cara pandang masyarakat ini merupakan pondasi yang kokoh bagi terbangunnya lembaga masyarakat yang mandiri, melalui pemberdayaan para pelaku-pelakunya, agar mampu bertindak sesuai

⁵ *Ibid hal 111*

dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia luhur yang mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakatnya sehari-hari.

Kemandirian lembaga masyarakat ini dibutuhkan dalam rangka membangun lembaga masyarakat yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik ditingkat lokal agar lebih berorientasi ke masyarakat miskin (*pro poor*) dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), baik ditinjau dari aspek ekonomi, lingkungan (termasuk perumahan dan permukiman), maupun sosial.

Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan dari PNPM-Mandiri dengan tujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menjalankan proses pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat dengan didukung oleh berbagai kalangan atau pemangku kepentingan lainnya. Pelaku utama pembangunan adalah masyarakat sendiri.

Pemerintah mendorong gerakan nasional ini melalui pengembangan sistem dan disain program, penyediaan pendampingan serta pendanaan stimulan dalam wadah PNPM-Mandiri yang akan mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam menjalankan upaya menanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja secara berkelanjutan.

Tujuan umum PNPM-Mandiri adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan meningkatkan kesempatan kerja. Sedangkan sasaran

PNPM-Mandiri adalah: 1) Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang belum dilibatkan secara optimal dalam proses pembangunan 2) Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel 3) Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor budgeting*) 4) Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah dan kelompok peduli (swasta, asosiasi, perguruan tinggi, media, LSM, dll) untuk lebih mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan 5) Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat serta pemerintah daerah serta kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya

Ajaran Islam mengakui adanya perbedaan pendapatan dan kekayaan pada setiap orang. Perbedaan itu terjadi karena setiap orang memiliki ketrampilan, inisiatif, usaha dan resiko yang berbeda-beda pula. Namun perbedaan itu tidak boleh menimbulkan kesenjangan yang terlalu jauh antara yang kaya dengan yang miskin, karena bila demikian tidak sesuai dengan syariah Islam yang menekankan bahwa sumber-sumber daya bukan saja karunia dari Allah bagi semua manusia, melainkan juga merupakan suatu amanah. Maka tidak ada alasan untuk mengkonsentrasikan sumber-sumber daya ditangan segelintir orang

Tabiat manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala sesuatu yang dibutuhkannya. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Kerjasama di antara sesama manusia adalah sebuah bentuk untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kerjasama pada dasarnya adalah merealisasikan tolong-menolong tersebut membawa kebaikan dan menghindarkan dari kemungkaran. Seperti firman-Nya dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah tolong-menolong dan gotong royong yang dilakukan kaum muslimin dalam melakukan segala kebajikan yang bermanfaat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji permasalahan yang timbul dalam Penulisan Muamalah ini yang berjudul: “Pelaksanaan Pembiayaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri di Desa Sayati Kabupaten Bandung”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses pembiayaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Sayati Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pembiayaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Sayati Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pembiayaan Program Nasional Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Sayati Kabupaten Bandung
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh Muamalah terhadap pembiayaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Sayati Kabupaten Bandung

D. Kerangka Pemikiran

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang, setiap utang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar utang

Kebutuhan manusia yang beraneka ragam tidak dapat terpenuhi tanpa adanya bantuan dari orang lain, sehingga masyarakat harus tolong-menolong

dalam berbuat kebajikan, sebagaimana tersirat dalam surat al-Maidah ayat 2 di atas

Tingkat pendapatan manusia ada yang lebih dan ada yang cukup dan ada yang kurang. Bagi orang yang pendapatannya kurang dan sangat membutuhkan maka dia harus ditolong jika dia membutuhkan pinjaman. Dan dalam Islam ada istilah 'Ariyah yaitu pinjaman. Sedangkan pinjaman yang sifatnya tolong menolong disebut *Qardh al-Hasan*

Pinjaman atau 'ariyah menurut bahasa ialah pinjaman, sedangkan menurut istilah, 'ariyah ada beberapa pendapat, diantaranya⁶

-Menurut Hanafiyah, 'ariyah adalah

تَمْلِيكَ الْمَنَاءِ بِعِ مَحَانًا.

“Memilikan manfaat secara cuma-cuma”

- Menurut Malikiyah, 'ariyah ialah

تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ مُوقَّتَةٍ لِابِعْوَصٍ

“Memilikan manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan”

- Menurut Syafi'iyah, 'Ariyah ialah

إِبَاحَةُ الْإِنْتِفَاعِ مِنْ شَخْصٍ فِيهِ أَهْلِيَّةُ التَّرُّعِ بِمَا يَحِنُّ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ لِيَرُدُّهُ عَلَى الْمَتَرُّعِ.

“Kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.”

⁶ Lihat, Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2005 hlm 91-92

- 'Ariyah adalah kebolehan mengambil manfaat barang-barang yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain dengan tanpa ganti⁷.

Akad *Qard al-Hasan* dapat diterapkan untuk membantu ummat dalam mengembalikan usahanya, sehingga dapat terbentuk sebuah semangat wirausaha dalam sector industry kecil-mikro, yang pada akhirnya akan memacu percepatan ekonomi kerakyatan berbasis syari'ah dan merupakan produk pembiayaan (modal) bagi usaha kecil-mikro dikenal dengan istilah *Qard al-Hasan*. Sifat *Qard al-Hasan* tidak memberikan keuntungan financial bagi pihak yang meminjamkan

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali natau dengan kata lain meminjmkan tanpa mengharapkal imbalan. Dalam literature fiqh klasik, qardh dikategorikan dalam aqd *tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial⁸

Landasan hukum al-Qardh terdapat dalam al-Quran surat al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَ الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ , وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

Ayat diatas menyeru kepada kita untuk “ meminjamkan kepada Allah”, yang artinya adalah kita diseru untuk membelanjakan harta dijalan Allah

⁷ Lihat, Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 1977 hlm 67

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, hlm 163

Sejalan dengan itu, kita juga diseru untuk”meminjamkan kepada sesama manusia” sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat

Sedangkan dalam hadits Rasul SAW yang menjadi dasar pelaksanaan akad Qardh ini yaitu,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْحَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةَ بَعْتَرُ
أَمْثَالَهَا وَالْقَرْضُ بِتَمَائِيَةِ عَشْرَ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا نَالُ الْقَرْضُ
أَفْضَلَ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرَضُ
لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاحَةٍ.

“Anas bin malik berkata bahwa Rasulullah bersabda “Aku melihat pada waktu malam di-isra’kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya wahai jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta peminta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam dia tidak akan meminjamkan kecuali dengan keperluan.”⁹

Cita-cita bangsa Indonesia memajukan kesejahteraan umum, maka Pemerintah membuat suatu program untuk menanggulangi kemiskinan yang menjadi permasalahan utama bagi kelanjutan pembangunan Negara Indonesia, salah satunya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan masyarakat PNPM dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan

⁹ *Ibid*, hlm 132

untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan¹⁰

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai¹¹. Untuk menjalankan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri tersebut, dibentuklah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) merupakan wadah bersinergi yang bersifat representatif (mewakili masyarakat miskin), mengakar, dan dipercaya oleh berbagai pihak.

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah penelitian yang akan ditempuh oleh penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu mengumpulkan data dan menggambarkan data dengan apa adanya tanpa

¹⁰ Tim Pengendali PNPM Mandiri, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri*, Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2007, hlm 11

¹¹ *Ibid*

menambah atau menguranginya serta mengumpulkan data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data yang sudah dikumpulkan dikemukakan maksud dan kandungan maknanya dengan mencari solusi atau pemecahan masalah atas persoalan yang muncul dalam penelitian yang sedang dilakukan, disamping mengumpulkan data juga memecahkan masalah yang ditemukan dalam penelitian di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Badan Keswadayaan Masyarakat Sayati di Desa Sayati Kabupaten Bandung. Yaitu di jalan sukamenak gg saluyu 3 no 59, kurang lebih 1,5 km dari jalan kopo.

3. Sumber Data

Penulisan sumber data dalam hal ini didasarkan atas jenis data yang ditentukan, maka dalam penelitian ini ditentukan data primer dan data sekunder¹².

Sumber data yang digunakan oleh penulis terdiri dari

Sumber Data Primer

- a. Hasil wawancara dengan yang dijadikan objek penelitian yakni fasilitator PNPM, pengurus BKM dan Anggota BKM.
- b. Literatur fiqh muamalah

¹² Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi (Bidang Ilmu Agama Islam)* 1998, hlm 64

4. Jenis Data

Bahwa jenis data dalam penelitian ini dengan menggunakan jenis data kualitatif, yaitu dengan menggunakan penalaran logis terhadap data-data yang didapatkan dari lokasi penelitian

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Observasi

Penulis melakukan pengamatan dan penulisan secara sistematis tentang perilaku yang benar-benar terjadi pada penyaluran dana Program Nasionala Penanggulangan Masyarakat Mandiri di BKM Sayati. Dalam hal ini penulis melihat langsung dari dekat realitas penyaluran dana PNPM Mandiri. Dengan tehnik seperti ini penulis memperoleh gambaran yang factual tentang masalah yang penulis teliti. Selanjutnya observasi ini melengkapi hasil wawancara

b. Wawancara

Teknik ini merupakan salah satu jenis tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara terhadap fasilitator PNPM, Pengurus BKM dan Anggota BKM mengenai masalah yang diteliti

c. Studi Kepustakaan

Mengkaji berbagai literatur tentang persoalan pinjaman atau penyaluran dana PNPM Mandiri di BKM Sayati. Dan mengumpulkan

data melalui referensi-referensi yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

6. Analisis Data

Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Data yang dikumpulkan dan klasifikasi harus sesuai dengan penelitian, data yang diperoleh melalui wawancara dari Pengurus BKM dan anggotanya dihubungkan dengan data yang diperoleh dari buku-buku maupun literatur lainnya.

